

# Pemberdayaan PKK dalam Rangka Tertib Administrasi dan Tata Kelola Keuangan TPKK Medan Petisah

Etty Harya Ningsi <sup>a,1,\*</sup>; Lambok Manurung <sup>a,2</sup>; Selvi Aristantya <sup>a,3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Battuta, Medan, Indonesia

<sup>1</sup> [ettysumadin@gmail.com](mailto:ettysumadin@gmail.com)

\* Corresponding author

 <https://doi.org/10.25134/jise.v4i2.139>

Article history: Received June 2, 2025; Revised June 12, 2025; Accepted June 13, 2025; Available online July 6, 2025

**Abstrak:** Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kecamatan Medan Petisah merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan berbasis komunitas, khususnya dalam hal tertib administrasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman anggota TP-PKK terhadap penyusunan laporan keuangan, pengelolaan anggaran, serta pengarsipan administrasi organisasi yang sesuai standar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial anggota PKK melalui pendekatan partisipatif. Program dilaksanakan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), yang mencakup asesmen kebutuhan, pelatihan teknis administrasi dan keuangan, workshop tematik, serta pendampingan lapangan yang diikuti dengan monitoring dan evaluasi hasil. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, keterampilan menyusun laporan kegiatan dan keuangan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program. Kegiatan ini juga menghasilkan modul pelatihan dan template laporan keuangan yang dapat direplikasi di wilayah lain. Kesimpulannya, program ini berkontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola organisasi perempuan berbasis komunitas dan mendorong terciptanya sistem pengelolaan PKK yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan di Kecamatan Medan Petisah.

**Kata Kunci:** PKK; Pemberdayaan; Administrasi; Tata Kelola Keuangan; Partisipasi Masyarakat

**Abstracts:** The empowerment of the Family Welfare Movement (PKK) Team in Medan Petisah Subdistrict is a strategic initiative to strengthen community-based organizational capacity, particularly in administrative orderliness and accountable financial governance. The main problems identified include the low understanding of PKK members regarding financial reporting, budget management, and standardized administrative documentation. This community service program aims to enhance the technical and managerial capabilities of PKK members through a participatory approach. The program was implemented using the Participatory Action Research (PAR) method, consisting of needs assessment, technical training in administration and finance, thematic workshops, and field mentoring, followed by ongoing monitoring and evaluation. The results show a significant improvement in participants' understanding of transparency and accountability principles, skills in preparing activity and financial reports, and increased community participation in program oversight. This initiative also produced training modules and financial reporting templates that can be replicated in other regions. In conclusion, this initiative effectively contributes to the strengthening of grassroots women's organizational governance and promotes a more structured, transparent, and sustainable PKK system in Medan Petisah.

**Keyword:** PKK; Empowerment; Administration; Financial Governance; Community Participation

## 1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan esensial dalam membangun pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di Indonesia, organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan berbasis keluarga. PKK tidak hanya menjadi pelaksana program-program pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai

agen perubahan sosial di tingkat akar rumput. Peran ini menuntut adanya kapasitas kelembagaan yang kuat, khususnya dalam aspek administrasi dan tata kelola keuangan. Administrasi yang tertib dan keuangan yang akuntabel diperlukan agar seluruh kegiatan PKK dapat berjalan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kecamatan Medan Petisah, sebagai salah satu wilayah urban di Kota Medan dengan dinamika sosial ekonomi yang tinggi, menunjukkan kebutuhan besar akan penguatan kelembagaan PKK. Berdasarkan data BPS Kota Medan tahun 2023, wilayah ini dihuni oleh lebih dari 95.000 jiwa dengan mayoritas keluarga berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. TP-PKK di tiap kelurahan menjadi ujung tombak dalam menyampaikan program-program sosial pemerintah. Namun, hasil observasi awal dan asesmen lapangan pada lima kelurahan menunjukkan bahwa lebih dari 70% anggota TP-PKK belum memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan keuangan organisasi. Permasalahan tersebut berdampak pada ketidakteraturan pencatatan kegiatan, ketidaktepatan penggunaan dana, dan lemahnya sistem pelaporan yang memengaruhi transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan program. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama yang ingin dipecahkan adalah: (1) Rendahnya pemahaman teknis anggota TP-PKK mengenai akuntabilitas dan tata kelola keuangan, (2) Tidak tersedianya sistem administrasi dan dokumentasi yang terstandar, (3) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan program PKK.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial anggota TP-PKK dalam bidang administrasi dan tata kelola keuangan organisasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendorong lahirnya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi komunitas serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi program-program yang dijalankan TP-PKK.

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini meliputi: (1) Pelatihan berbasis modul dan simulasi pelaporan keuangan, (2) Workshop teknis dan penyusunan SOP administrasi PKK yang aplikatif, (3) Pendampingan lapangan melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan peserta secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil.

Potensi wilayah Medan Petisah sangat mendukung kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas. Tingginya konsentrasi kelompok perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial serta akses yang relatif baik terhadap sumber informasi dan teknologi menjadi modal sosial yang penting untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan terhadap program pelatihan PKK menunjukkan adanya sinergi yang dapat memperkuat keberlanjutan kegiatan ini di masa depan.

Penguatan kapasitas organisasi perempuan berbasis komunitas memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola lokal. Penelitian Nurlaili *et al.* (2021) membuktikan bahwa pelatihan administrasi dan keuangan dapat meningkatkan efektivitas program PKK hingga 35%. Wulandari (2020) menekankan pentingnya sistem pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat TP-PKK sebagai instrumen pembangunan komunitas. Pendekatan partisipatif juga diakui efektif dalam membangun kapasitas kelembagaan akar rumput (Siregar & Harahap, 2022).

Adapun target luaran kegiatan ini meliputi: (1) Peningkatan kompetensi teknis peserta dalam menyusun laporan dan dokumen organisasi, (2) Tersedianya sistem administrasi sederhana yang tertib dan terdokumentasi, (3) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pengawasan program PKK.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan perubahan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kelembagaan yang dapat direplikasi dan dikembangkan secara berkelanjutan di wilayah lain.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif-transformasional, yang mengacu pada prinsip *community-based empowerment* (Suparlan, 2013; Chambers, 1994). Pendekatan ini menempatkan anggota TP-PKK sebagai subjek utama dalam proses perubahan, dengan mendorong keterlibatan aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Tujuan utama dari metode ini adalah membentuk organisasi yang mandiri dalam hal pengelolaan administrasi dan tata kelola keuangan, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025 mencakup persiapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pasca pelatihan. Proses berlangsung di Kecamatan Medan Petisah, dengan lokasi utama di balai kelurahan dan ruang komunitas perempuan.

Secara konseptual, kegiatan ini merujuk pada **Teori Kapabilitas Amartya Sen**, yang menyatakan bahwa pembangunan harus memperluas kebebasan individu untuk bertindak secara efektif dalam kehidupan sosialnya, termasuk dalam organisasi komunitas. Pemberdayaan anggota PKK dalam hal administrasi dan keuangan dipandang sebagai proses peningkatan *capability set* mereka untuk mengelola program berbasis masyarakat secara lebih baik.

### Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan ini dirancang dalam empat (4) tahap implementatif yang bersifat siklikal dan berorientasi pada hasil nyata, dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR):

#### 1. Identifikasi Masalah

Tim pengabdian melakukan observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur dengan 25 anggota aktif TP-PKK di lima kelurahan di Kecamatan Medan Petisah. Tahapan ini bertujuan untuk memetakan kesenjangan kompetensi administratif dan keuangan, serta menggali kebutuhan riil mitra. Instrumen asesmen dikembangkan berdasarkan prinsip *need assessment* dan digunakan sebagai dasar penyusunan modul pelatihan.

#### 2. Sosialisasi Program

Sosialisasi dilakukan di balai kelurahan bersama para ketua dan anggota TP-PKK. Kegiatan ini mencakup pemaparan latar belakang kegiatan, urgensi peningkatan tata kelola organisasi, serta rencana dan manfaat pelatihan. Dalam tahap ini dibangun *shared commitment* agar peserta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias dan konsisten.

#### 3. Pelatihan dan Workshop

Pelatihan dilaksanakan secara intensif menggunakan pendekatan andragogi, yaitu metode pembelajaran orang dewasa yang menekankan praktik langsung dan pemecahan masalah kontekstual. Materi pelatihan meliputi:

- a. Prinsip dasar administrasi organisasi berbasis komunitas;
- b. Teknik menyusun laporan keuangan berbasis kas;
- c. Pengelolaan anggaran berbasis kegiatan;
- d. Praktik pencatatan manual dan digital sederhana;
- e. Simulasi penyusunan dokumen: buku kas umum, laporan pertanggungjawaban, dan arsip program.

Workshop diadakan dalam bentuk kerja kelompok dan studi kasus berbasis permasalahan aktual yang ditemukan saat asesmen.

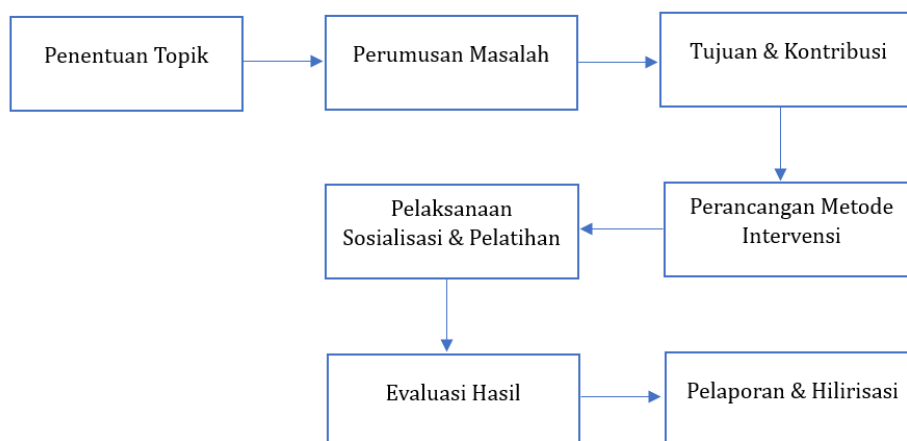
#### 4. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif berlangsung selama proses pelatihan melalui observasi langsung dan umpan balik peserta, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan melalui:

- a. Pre-test dan post-test (20 soal pilihan ganda) untuk mengukur peningkatan kognitif;
- b. Checklist observasi keterampilan saat workshop;
- c. Kuesioner persepsi dan sikap terhadap akuntabilitas dan partisipasi;
- d. Analisis dokumen administrasi sebelum dan sesudah pelatihan.

Monitoring dilakukan dalam bentuk kunjungan lapangan pasca pelatihan untuk mengamati implementasi langsung hasil pelatihan di sekretariat PKK masing-masing kelurahan.

Sebagai acuan visual, berikut ini adalah diagram alir pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat:



Gambar 1. Diagram Alir PkM

### Pelaksanaan Teknis

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025 di Kecamatan Medan Petisah, bertempat di balai kelurahan dan ruang komunitas perempuan. Tim pelaksana terdiri atas dosen dan mahasiswa dari bidang akuntansi, manajemen, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas tim terbagi atas: fasilitator pelatihan, pendamping lapangan, tim monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi.

Sumber Daya dan Media

- Modul pelatihan administrasi dan keuangan;
- Lembar kerja praktikum dan media presentasi;
- Alat tulis dan perangkat teknologi sederhana (laptop, proyektor);
- Instrumen evaluasi dan dokumentasi kegiatan.

Seluruh materi dan metode disusun berdasarkan hasil riset terdahulu yang relevan serta disesuaikan dengan konteks sosial dan kapasitas TP-PKK di Medan Petisah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Petisah berhasil memberikan dampak nyata terhadap penguatan kapasitas kelembagaan Tim Penggerak PKK, khususnya dalam aspek administrasi dan tata kelola keuangan. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan luaran dalam bentuk dokumen administratif dan peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya akuntabilitas organisasi komunitas.

#### Perubahan Kondisi Mitra: Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Sebelum pelaksanaan kegiatan, hasil asesmen awal menunjukkan bahwa lebih dari 70% anggota TP-PKK tidak memahami sistem pelaporan keuangan berbasis kas dan pencatatan administrasi organisasi. Dokumentasi kegiatan belum tersusun rapi, laporan anggaran tidak terstruktur, dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program relatif rendah. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, terjadi peningkatan yang signifikan. Hasil pre-test dan post-test disajikan pada tabel 1. Hasil menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor sebesar 38%, mencerminkan peningkatan kapasitas kognitif peserta dalam memahami prinsip dasar administrasi dan keuangan organisasi.

**Tabel 1.** Rata-rata Skor Pre-test dan Post-test Peserta Pelatihan

No	Kelurahan	Skor Pre-test (Rata-rata)	Skor Post-test (Rata-rata)	Peningkatan (%)
1	Petisah Tengah	48	86	38%
2	Sei Putih Timur I	51	87	36%
3	Sei Putih Barat	46	85	39%
4	Madras Hulu	49	88	39%

5	Sei Putih Tengah	50	87	37%
	Rata-rata	48.8	86.6	38%

Peningkatan ini selaras dengan temuan Nurlaili et al. (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan teknis berbasis partisipatif dapat meningkatkan efektivitas kader PKK hingga 35%. Selain itu, Siregar dan Harahap (2022) juga mencatat bahwa keterlibatan langsung peserta dalam praktik pencatatan keuangan mampu memperkuat pemahaman konsep akuntabilitas pada level komunitas.

### Luaran Utama Kegiatan

Kegiatan pengabdian menghasilkan beberapa luaran nyata yang telah terimplementasi secara efektif, antara lain:

- Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan  
Rata-rata peningkatan skor post-test mencapai 38% dan sebesar 85% peserta menyatakan lebih percaya diri dalam mengelola laporan keuangan dan dokumentasi kegiatan secara mandiri.
- Produksi Dokumen Administratif Mandiri  
Setiap kelompok PKK di lima kelurahan berhasil menyusun: buku kas umum harian, laporan kegiatan triwulanan, format laporan pertanggungjawaban sederhana dan notulen rapat rutin PKK.

### Dampak Program: Jangka Pendek dan Panjang

#### Jangka Pendek

- Meningkatnya keterampilan teknis anggota dalam menyusun laporan kas dan dokumen administrasi lainnya.
- Terbentuknya tim pengelola administrasi di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan.

#### Jangka Panjang

- Implementasi format standar pengarsipan dan pelaporan yang dapat diadopsi secara berkelanjutan,
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah PKK sebesar 60%.
- Terbangunnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas organisasi berbasis komunitas.

Temuan ini memperkuat studi Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa organisasi perempuan berbasis komunitas mampu menjadi agen perubahan sosial apabila dilengkapi dengan kapasitas manajerial yang kuat.

### Indikator dan Tolak Ukur Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif, antara lain:

- Peningkatan skor pre-test dan post-test minimal 30%.
- Jumlah dan kualitas dokumen administrasi yang disusun secara mandiri oleh peserta.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan musyawarah PKK.
- Hasil umpan balik peserta melalui kuesioner menunjukkan tingkat kepuasan di atas 90% terhadap metode dan materi pelatihan.

### Keunggulan dan Tantangan Program

#### Keunggulan

- Materi pelatihan berbasis pada need assessment lokal, sehingga lebih aplikatif dan relevan.
- Partisipasi lintas usia dan latar belakang pendidikan memungkinkan pembelajaran kolektif yang saling memperkuat.
- Pendekatan partisipatif mendorong ownership dan komitmen peserta terhadap perubahan.

#### Tantangan

- Sekitar 15% peserta, terutama kelompok usia lanjut, masih mengalami kesulitan dalam adaptasi terhadap sistem pencatatan yang baru.
- Keterbatasan waktu pelatihan menghambat pendalaman terhadap materi digitalisasi.

Kendala ini menjadi dasar untuk perencanaan program lanjutan yang lebih intensif dan inklusif, dengan penekanan pada pelatihan berbasis teknologi sederhana.

### Peluang Pengembangan dan Replikasi

Kegiatan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model pelatihan terintegrasi bagi organisasi perempuan di wilayah urban lainnya. Pengenalan perangkat lunak sederhana seperti Microsoft Excel dan aplikasi pencatatan digital dapat mempercepat proses modernisasi pengelolaan keuangan komunitas. Peluang kerja sama terbuka luas dengan pihak kelurahan, dinas pemberdayaan perempuan, serta Universitas Battuta sebagai pendamping teknis dan akademik.



**Gambar 1.** Dokumentasi Pelatihan Tata Kelola Keuangan PKK Medan Petisah

Kegiatan pengabdian ini telah terbukti memberikan dampak positif dalam menyelesaikan permasalahan mitra terkait lemahnya kapasitas administrasi dan keuangan. Melalui pendekatan berbasis partisipasi dan kebutuhan lokal, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis anggota PKK, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya akuntabilitas. Hasil luaran yang tercapai menunjukkan keberhasilan program dalam membentuk organisasi masyarakat yang lebih tertib, mandiri, dan transparan.

Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian oleh Sutrisno et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kebutuhan lokal mampu meningkatkan kompetensi administratif organisasi perempuan di tingkat desa secara signifikan, terutama dalam pengelolaan keuangan berbasis kas sederhana. Selain itu, studi oleh Handayani dan Lestari (2019) menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pendekatan partisipatif diterapkan secara konsisten dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif anggota TP-PKK dalam seluruh tahapan kegiatan telah menciptakan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap perubahan, yang pada gilirannya memperkuat keberlanjutan praktik administrasi yang akuntabel.

Peningkatan kapasitas administratif yang disertai dengan pembentukan tim pencatatan di tingkat kelurahan menjadi salah satu bentuk konkrit dari penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip *community capacity building* sebagaimana dikemukakan oleh Labonte dan Laverack (2001), yang menekankan pentingnya membangun struktur internal yang mendukung keberlanjutan transformasi sosial. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam aspek teknis, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi untuk beradaptasi dengan tantangan tata kelola di masa mendatang.

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Petisah menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi perempuan, seperti TP-PKK, melalui pendekatan partisipatif dan kontekstual, mampu menciptakan dampak transformasional. Intervensi yang dilakukan tidak hanya memperkuat keterampilan administratif dan keuangan, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif dalam penyelenggaraan program berbasis komunitas.

Dampak keberlanjutan tercermin dari terbentuknya sistem pencatatan dan pelaporan sederhana yang mulai diadopsi secara mandiri oleh peserta, serta meningkatnya partisipasi warga dalam forum evaluasi dan pengawasan program. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa pemberdayaan teknis dapat menjadi pintu masuk untuk perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih profesional dan berorientasi layanan publik. Dukungan keberlanjutan pelatihan lanjutan secara berjenjang disarankan dilakukan melalui kemitraan

strategis antara TP-PKK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta perguruan tinggi seperti Universitas Battuta. Replikasi program dapat difasilitasi melalui penyusunan modul pelatihan baku dan pembuatan SOP (Standard Operating Procedure) administrasi komunitas yang dapat digunakan lintas wilayah. Rekomendasi kebijakan, hasil kegiatan ini layak diadopsi oleh Pemerintah Kota Medan atau kelurahan setempat sebagai program pemberdayaan rutin, terutama untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan berbasis gender dan partisipasi masyarakat. Selain itu, program ini dapat dijadikan pilot project untuk penguatan tata kelola organisasi komunitas berbasis digital sederhana, selaras dengan agenda reformasi birokrasi berbasis masyarakat.

Dengan demikian, pengabdian ini membuktikan bahwa pemberdayaan organisasi perempuan tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga merupakan strategi efektif dalam memperkuat kualitas tata kelola masyarakat yang partisipatif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R., & Praptono, S. (2020). Pelatihan Administrasi PKK RW 06 Di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 305-308.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437-1454.
- Graha, A. N. (2009). Pengembangan masyarakat pembangunan melalui pendampingan sosial dalam konsep pemberdayaan di bidang ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(2), 117-126.
- Handayani, R., & Lestari, D. (2019). Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat desa: Studi kasus program pelatihan administrasi komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 5(2), 122-135.
- Kaparang, Revleen (2017) *IbM Pengelolaan Administrasi Keuangan PKK di Kelurahan Paslaten 2 Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon*. Project Report. Politeknik Negeri Manado.
- Labonte, R., & Laverack, G. (2001). Capacity building in health promotion, Part 1: For whom? And for what purpose? *Critical Public Health*, 11(2), 111-127.
- Manurung, L., & Ningsi, E. H. (2024). Pelatihan Manajemen Keuangan Di Koperasi Prajurit Korem 023/Ks Sibolga. *Proficio*, 5(2), 634-636.
- Ningsi, E. H., Manurung, L., & Lubis, I. T. (2024). Penataan Administrasi Keuangan untuk Menciptakan Badan Usaha yang Tertib dalam Pelaporan Keuangan Pada CV. Biru Utama. *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 125-129.
- Ningsi, E. H., Manurung, L., & Lubis, I. T. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Di Masyarakat Pedesaan Kecamatan Lubuk Pakam. *Proficio*, 5(2), 150-155.
- Nurlaili, L., Fitriani, R., & Hanum, S. (2021). Penguatan kapasitas administrasi dan keuangan dalam meningkatkan efektivitas program PKK. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 123-135.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- Permatasari, A., & Sofyan, N. (2021). Pendampingan Tata Kelola Dan Digitalisasi Administrasi PKK. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
- Putria, U. (2023). Pendampingan Manajemen Keuangan Keluarga pada Era New Normal. *Sivitas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 77-87.
- Siregar, A., & Harahap, D. (2022). Efektivitas pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan organisasi akar rumput. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 45-58.
- Sugiyarti, S. R., Suwardi, S., & Choerudin, A. (2024). Tata Kelola Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(3).
- Sutrisno, H., Arifah, N., & Prasetyo, R. (2020). Peningkatan kapasitas organisasi perempuan melalui pelatihan administrasi keuangan berbasis kebutuhan lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 7(1), 45-56.
- Suparlan, P. (2013). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Supriyadi, T., & Rachman, A. (2022). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan tata kelola administrasi organisasi masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 2(1), 51–58.
- Utami, L. M., & Widodo, T. (2021). Penguatan tata kelola organisasi melalui digitalisasi administrasi dan keuangan di komunitas perempuan. *Jurnal Abdi Masyarakat Madani*, 3(2), 89–97.
- Wulandari, E. (2020). Peran TP-PKK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Pengembangan Sosial*, 8(1), 32–40.**
- Yuliana, E., & Firmansyah, D. (2023). Peningkatan akuntabilitas organisasi perempuan melalui pelatihan manajemen keuangan partisipatif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 144–152.